

**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE 2000 – 2007**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

LINGGAR DEWANGGA PUTRA
NIM. C2B003169

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Linggar Dewangga Putra
Nomor Induk Mahasiswa : C2B 003 169
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE 2000 - 2007**
Dosen Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si

Semarang, 22 Februari 2011

Dosen Pembimbing

(Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si)
NIP. 19690510 199702 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama penyusun : Linggar Dewangga Putra

Nomor Induk Mahasiswa : C2B 003 169

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE 2000 - 2007**

Dosen Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 Maret 2011

Tim Penguji :

1. Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si (.....)

2. Prof. Drs. H. Waridin, MS, Ph.D (.....)

3. Nenek Woyanti, SE, MSi (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Linggar Dewangga Putra, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007, adalah hasil tujuan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, (22, Februari, 2011)
Yang membuat pernyataan,

(Linggar Dewangga Putra)
NIM : C2B003169

ABSTRAKSI

Kemiskinan selalu menjadi masalah di setiap negara sedang berkembang, bahkan di negara maju pun juga. Di Indonesia, tingginya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adanya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan antar satu provinsi dengan provinsi lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ketimpangan distribusi pendapatan, yang diukur menggunakan Indeks Gini dan Indeks Williamson, terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Salah satu penyebab utama kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ialah dikarenakan adanya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan pada tiap Kabupaten/kotanya, untuk menekan tingkat kemiskinan tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta Pemerintah Daerah harus bias bekerja sama untuk memperkecil perbedaan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan agar jangan terlalu tinggi antara satu Kabupaten/kota dengan yang lain.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan log linear dengan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependen dan dua variabel independen yaitu, Indeks Gini dan Indeks Williamson sebagai alat ukur ketimpangan distribusi pendapatan.

Setelah dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas, ternyata hasilnya menunjukkan data terdistribusi normal. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai F sebesar 16,686 (probabilitas = 0,006) dan koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0,870. Melalui regresi dapat diperoleh hasil bahwa Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat ketimpangan pendapatan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Williamson (dengan nilai 1,834) dan Indeks Gini (dengan nilai 0,477). Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Williamson lebih berpengaruh dibandingkan Indeks Gini.

Kata Kunci : Jumlah Penduduk Miskin, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Indeks Gini, Indeks Williamson.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi jurusan IESP Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak lain baik dari segi moral dan materi. Untuk itu sudah sepantasnya dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT karena hanya karena kehendaknya semua bisa terjadi.
2. Bapak Dr. H. Mochammad Chabachib, MSi.,Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. Edy Yusuf AG, MSc selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Purbayu Budi Santosa, MS selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis, dan memberikan nasehat,

motivasi, dan arahan selama Penulis belajar di Fakultas Ekonomi UNDIP.

5. Bapak Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi UNDIP yang telah mencurahkan ilmunya pada penulis dengan penuh keikhlasan.
7. Ayah dan Ibunda (Marhento Wintolo dan Wening Siswantini) tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materi tiada henti.
8. Kakakku dan Adikku (Dianingtyas Murtanti Putri, Indra Arianto dan Indri Yuniasih) yang kusayangi.
9. Istri dan Anakku tersayang (Indah Kartini Damayanti dan Helenia Sachineera Zenobya), atas kesabaran, pengertian dan kasih sayang yang selalu menyemangatiku kapanpun.
10. Sahabat-sahabat setiaku yang selalu memberikan semangat (Aldino, Panca, Polang, Hyxos, Bowo, Hendrik, Mamet, Dheny, Doyok, Nia, Dena), terimakasih atas dukungannya.
11. Kawan-kawan seperjuangan di IESP'03, terimakasih atas semuanya.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat memberi masukan guna menjadikan karya yang lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 22 Februari 2011

Penulis,

Linggar Dewangga Putra
NIM : C2B 003 169

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Kemiskinan	14
2.1.1.1 Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan.....	15
2.1.1.2 Mengukur Kemiskinan.....	16
2.1.1.3 Konsep Kemiskinan.....	17

2.1.1.4	Dimensi Kemiskinan	19
2.1.2	Distribusi Pendapatan	20
2.1.2.1	Pengertian Distribusi Pendapatan.....	20
2.1.2.2	Pembangunan Dengan Pemerataan	22
2.1.3	Kurva Lorenz	24
2.1.4	Indeks Gini.....	25
2.1.5	Indeks Williamson	27
2.1.6	Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan.....	28
2.2	Penelitian Terdahulu	28
2.3	Kerangka Pemikiran	31
2.4	Hipotesis	32
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional.....	34
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3	Metode Pengumpulan Data	36
3.4	Metode Analisis Data.....	36
3.4.1	Indikator Ketimpangan.....	36
3.4.1.1	Analisis Indeks Williamson.....	36
3.4.2	Analisis Regresi Berganda.....	37
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.4.3.1	Uji Multikolinearitas.....	38
3.4.3.2	Uji Heteroskedastisitas.....	39

3.4.3.3 Uji Autokorelasi	40
3.4.4 Pengujian Hipotesis.....	41
3.4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	41
3.4.4.2 Uji Signifikansi Partial (Uji t).....	41
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kondisi Wilayah.....	43
4.1.1 Letak Geografis.....	43
4.1.2 Batas Wilayah.....	43
4.1.3 Kondisi Kemiskinan.....	44
4.1.4 Kependudukan	45
4.2 Analisis Ketimpangan.....	46
4.2.1 Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah.....	46
4.3 Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007	47
4.3.1 Analisis	47
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	47
4.3.2.1 Uji Multikolinearitas.....	47
4.3.2.2 Uji Autokorelasi	48
4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas	49
4.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis.....	50
4.3.3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	50
4.3.3.2 Uji F.....	51

4.3.3.3 Uji t.....	52
4.4 Pembahasan dan Analisis.....	55
4.4.1 Analisis Regresi Berganda.....	55
4.4.2 Analisis Indeks Gini.....	56
4.4.3 Analisis Indeks Williamson.....	57
4.4.4 Analisis Jumlah Penduduk Miskin.....	58
BAB V	
PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kondisi Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 1996 – 2007	7
Tabel 1.2 PDRB PerKapita dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2004 – 2007	8
Tabel 1.3 Distribusi Pendapatan Jawa Tengah 2000 – 2007	10
Tabel 4.1 Indeks Williamson Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 – 2007.....	46
Tabel 4.2 Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).....	48
Tabel 4.3 Nilai Durbin-Watson	49
Tabel 4.4 Nilai Koefisien Determinasi (R^2)	51
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Signifikansi Secara Simultan (Uji F)	51
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2004 – 2007	9
Gambar 2.1 Gambar Kurva Lorenz	25
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran Analisis	32
Gambar 4.1 jumlah penduduk miskin provinsi jawa tengah tahun 2000 – 2007 (000 jiwa)	44

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
GRAFIK 4.1 Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 – 2007.....	57
GRAFIK 4.2 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 – 2007 .	58
GRAFIK 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 – 2007	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- A. Data Mentah
- B. Data Analisis
- C. Hasil Regresi
- D. Uji Glejser
- E. ScatterPlot

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, dan juga selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan yang lalu. Perhatian ini timbul karena adanya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan semakin tingginya tingkat kesenjangan yang terjadi. Hal ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi seperti: Kuznet (1996) dengan hasil penelitiannya di beberapa negara, demikian pula dengan Adelman dan Morris (1973) serta Chennery dan Syrquin (1975), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu diikuti dengan meningkatnya kesenjangan terutama pada tahap awal proses pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini telah mengembangkan anggapan yang menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembagian

pendapatan terdapat suatu *trade-off*, dimana pertumbuhan ekonomi yang pesat akan membawa konsekuensi meningkatnya ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sebaliknya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang cukup baik akan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat atau diturunkan.

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada negara miskin dan berkembang. Menurut Lincoln Arsyad (1997), banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara-negara miskin yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut di Negara Sedang Berkembang (NSB). Dengan kata lain, pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan, pertumbuhan GNP per kapita di beberapa negara yang sedang berkembang (seperti India, Pakistan, Kenya) telah menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat hidup penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan.

Ketimpangan pembangunan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah,

dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan *slumps* (kumuh) di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kantong-kantong pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan.

Apa yang disebut dengan proses “*trickle down effect*” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi. Sebagian besar NSB yang mengalami laju pertumbuhan relatif tinggi tidak membawa manfaat yang berarti bagi penduduk miskinnya. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : pertama, *kemiskinan absolut*, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, *kemiskinan relatif*, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu kewajaran bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakteraturan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah.

Kondisi ini merupakan tantangan pembangunan yang harus kita hadapi mengingat masalah kesenjangan itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyulitkan kita dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan. Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Oleh karena itu ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya.

Ketidakpuasan dan kritik yang timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sehubungan dengan pertumbuhan yang telah dicapai akan tetapi karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, bahkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, rasa aman, dan lain-lain.

Di era Otonomi Daerah sekarang ini, dimana setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan disertai pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Dengan demikian ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pendapatan antar golongan ataupun daerah akan semakin menurun. Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari perekonomian nasional, dan mempunyai struktur ekonomi yang relatif sama maka strategi dan kebijakan pembangunan yang harus diterapkan pun relatif sama.

Dimana ketimpangan pendapatan antar daerah masih merupakan kondisi nyata yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat kemajuan antar daerah, perbedaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan besarnya tingkat pengangguran yang terjadi. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan pada tahun 2008 yaitu sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 32,63 juta jiwa atau sekitar 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Dengan jumlah penduduk sebesar itu maka seharusnya dapat membantu pembangunan, akan tetapi jika tidak diberdayakan maka hanya akan menambah beban pembangunan. Namun melihat keadaan yang sekarang dimana tingkat pertumbuhan penduduk terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Pada umumnya penduduk lebih banyak menumpuk di daerah kota dibandingkan kabupaten.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Serta 6 kota yaitu Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal.

Ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, diantaranya kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Aspek yang penting untuk diperhatikan selain peningkatan

pendapatan adalah pemerataan pendapatan, karena salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional ialah pemerataan pendapatan.

Menurut Kuznets (1996), pada tahap – tahap awal pertumbuhan ekonomi pendistribusian pendapatan cenderung memburuk namun pada tahap – tahap berikutnya akan membaik. Hipotesis ini lebih dikenal sebagai hipotesis “U-terbalik” Kuznets, sesuai dengan bentuk rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan pertumbuhan GNP per kapita yang akan terlihat seperti kurva yang berbentuk U-terbalik. Menurut Kuznets, distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 1996 sebesar 6,42 juta jiwa (21,61 persen), kemudian akibat krisis ekonomi jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 8,76 juta jiwa (28,46 persen) pada tahun 1999. Mengalami penurunan menjadi 7,41 juta jiwa (23,38 persen) di tahun 2002, kembali mengalami penurunan di tahun 2003 menjadi 6,78 juta jiwa (21,15 persen). Kemudian di tahun 2004 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 6,80 juta jiwa (21,00 persen). Lalu hingga tahun 2005 terus mengalami peningkatan menjadi 6,93 juta jiwa (21,07 persen), di tahun 2006 kembali mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 7,06 juta jiwa (21,94 persen). Selanjutnya menurun kembali menjadi 6,66 juta jiwa (20,56 persen) di tahun 2007. Batas kemiskinan selama periode 1996-2007 terus meningkat dari Rp 32.424,00 /kapita/bulan pada tahun 1996, Rp 130.013,00 /kapita/bulan pada tahun 2005, dan kemudian menjadi Rp 154.111,00 /kapita/bulan pada tahun 2007. Batas

kemiskinan dari tahun 1996 hingga 2007 meningkat cukup pesat disebabkan adanya inflasi akibat krisis ekonomi yang menyebabkan nilai mata uang riil berubah dan daya beli masyarakat menjadi turun, sehingga jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah memiliki angka yang tidak jauh berbeda. Kondisi kemiskinan Jawa Tengah ditunjukkan tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Kondisi Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 1996 – 2007

Tahun	Batas Kemiskinan (/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk (000 jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1996	Rp 32.424,00	29.698,845	6.417,60	21,61
1999	Rp 76.579,00	30.761,221	8.755,40	28,46
2002	Rp 106.438,00	31.691,866	7.408,30	23,38
2003	Rp 119.403,00	32.052,840	6.779,80	21,15
2004	Rp 126.651,00	32.397,431	6.803,80	21,00
2005	Rp 130.013,00	32.908,850	6.933,50	21,07
2006	Rp 142.337,00	32.177,730	7.060,60	21,94
2007	Rp 154.111,00	32.380,279	6.657,20	20,56

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai tahun.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif mengalami peningkatan. Ketimpangan pendapatan sejak tahun 1997 semakin meningkat akibat krisis ekonomi sehingga kemiskinan pun ikut meningkat. Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan Gini rasio.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga konstan terus mengalami perubahan. Demikian pula halnya untuk distribusi pendapatan. Berikut ini adalah

data mengenai besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di Jawa Tengah.

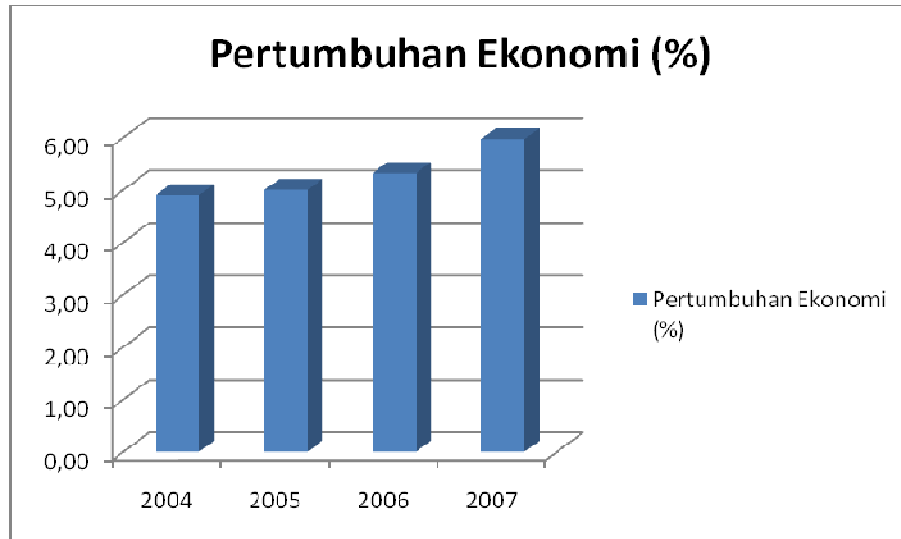
Tabel 1.2.
PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Jawa Tengah Tahun 2004 – 2007

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004	4.172.657	4,90
2005	4.473.430	5,00
2006	4.682.582	5,32
2007	4.913.801	5,97
Rata - rata	4.560.617,5	5,30

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2008

Berdasarkan pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2004 hingga 2007, PDRB per kapita atas dasar harga konstan provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Di tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,90 persen dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp 4.172.657, dan terus meningkat hingga tahun 2007 dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 sebesar 4.913.801 rupiah. Namun untuk pertumbuhan ekonomi pada 4 tahun dalam tabel diatas mengalami peningkatan dan penurunan. Rata – rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 hingga 2007 adalah sebesar 5,30 persen

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2004-2007



Untuk penghitungan Distribusi Pendapatan dapat dilihat melalui besarnya Gini rasio. Gini rasio merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Menurut Lincoln Arsyad (1997), angka koefisien Gini dari negara – negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidakmerataan sedang antara 0,36 – 0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35. Todaro (2000), menjelaskan angka ketimpangan bagi negara dengan tingkat ketimpangan yang tajam berkisar antara 0,50 sampai 0,70 dan bagi negara yang tingkat distribusi pendapatannya relatif baik berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Tabel 1.3
Distribusi Pendapatan Jawa Tengah Tahun 2000-2007

Tahun	Nilai Koefisien Gini
2000	0,2495
2001	0,2524
2002	0,2683
2003	0,2507
2004	0,2548
2005	0,2833
2006	0,2677
2007	0,2525
Rata-rata	0,2599

Sumber : BPS, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah berbagai tahun

Pada Tabel 1.3 diatas, rata – rata koefisien Gini Jawa Tengah tahun 2000 – 2007 sebesar 0,2599. Dari rata – rata tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah selama delapan tahun masih berada pada titik rendah karena masih dibawah 0,36.

Dalam hal ini penulis bermaksud menganalisis perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan untuk setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa tengah. Judul dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2000 - 2007”**.

1.2 Perumusan Masalah

Ketimpangan distribusi pendapatan yang dilihat dari koefisien Gini dapat disimpulkan bahwa di provinsi jawa tengah tingkat pemerataan pendapatan

penduduknya rendah atau semakin merata. Sehingga kesenjangan sosial juga semakin kecil karena nilai koefisien gini yang mendekati nol.

Pembangunan daerah pada saat ini dituntut untuk bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu akibat sering terkonsentrasinya pada pembangunan perekonomian di daerah maka kemiskinan yang muncul akibat ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin terlihat jelas. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita jika tidak diimbangi pemerataan distribusi pendapatan, maka tingkat kemiskinan akan terus meningkat. Akan tetapi jika pemerataan pendapatan sudah sangat baik sedangkan tingkat pendapatan nasional tidak mengalami peningkatan berarti prestasi kegiatan ekonomi tidak semakin membaik.

Di Provinsi Jawa Tengah, dengan melihat potensi yang dimiliki masing-masing daerah diharapkan daerah tersebut mampu mengatasi ketimpangan baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang terjadi selama ini serta menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap meningkatnya Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat ketimpangan pendapatan terhadap tingkat Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penelitian diatas diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan informasi bagi penelitian serupa mengenai tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah serta menambah pembendaharaan studi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Menambah masukan bagi pihak – pihak yang terkait dalam merencanakan pembangunan selanjutnya antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terutama yang berkaitan dengan penekanan angka kemiskinan, pemerataan pendapatan di daerahnya.
3. Sebagai bahan dan tambahan ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan dan sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah serta sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan strata 1 pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematik.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN meliputi, variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, jenis dan sumber data, dan hipotesis penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PENELITIAN ditampilkan hasil perhitungan data yang kemudian dilanjutkan dengan uraian sebagai analisis tentang perhitungan data tersebut.

BAB V : PENUTUP, berisi kesimpulan dari hasil analisis data serta saran yang dapat digunakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Pengertian lainnya Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut SMERU dalam Suharto, dkk (2004), adalah Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan

kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Menurut Depsos (2001), Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Friedman dalam Mudrajat Kuncoro (1997), Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi:

- a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan),
- b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit),
- c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial),
- d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa,
- e) pengetahuan dan keterampilan, dan
- f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup

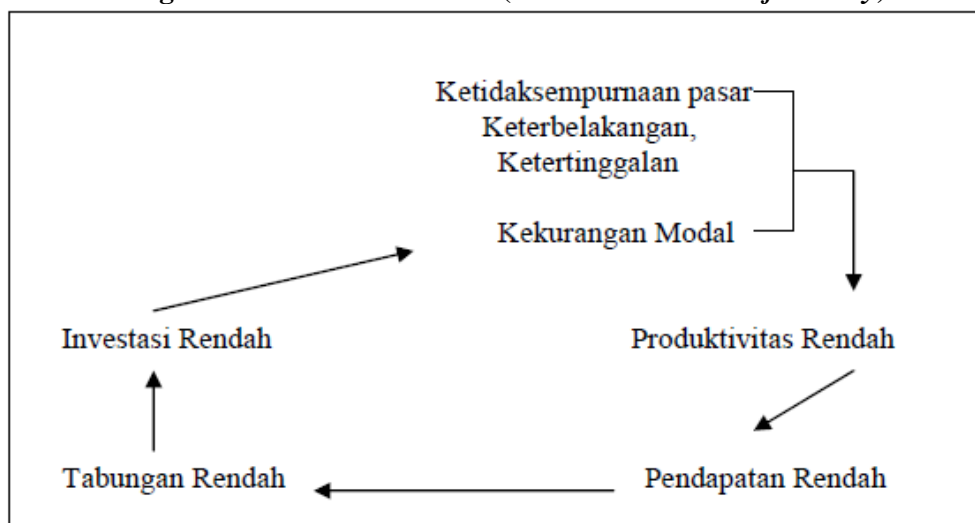
2.1.1.1 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Shrarp, et.al (1996) dalam Mudrajad Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi

pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (2000), yang mengatakan: *a poor country is poor because it is poor* (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)



Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan

seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Mudrajat Kuncoro, 1997).

2.1.1.2 Mengukur Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu.

Rumus dalam penghitungan garis kemiskinan (Menurut BPS) ialah :

$$GK = GKM + GKBM$$

Keterangan :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKBM = Garis Kemiskinan Bukan Makanan

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

2.1.1.3 Konsep Kemiskinan

Ada tiga macam konsep kemiskinan (Sunyoto Usman, 2004), yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit (*a fixed yardstick*). Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan.

Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan “*the idea of relative standard*”, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (*in terms of judgement*) anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep ini juga dikritik, terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan ternyata beragam dan terus berubah-ubah. Layak bagi komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lain, demikian juga layak pada saat sekarang boleh jadi tidak untuk mendatang.

Sedangkan kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal *a fixed yardstick*, dan tidak memperhitungkan *the idea of relatives standard*. Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin atau sebaliknya. Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap seperti itu. Oleh karenanya, konsep ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.

2.1.1.4 Dimensi Kemiskinan

ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan (Sunyoto Usman, 2004), yaitu perspektif kultural (*cultural perspective*) dan perspektif struktural atau situasioanl (*situational perspective*). Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, yaitu individual, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut dengan *a strong feeling of marginality*, seperti sikap parokial, apatisisme, fatalisme, atau pasrah pada nasib, boros, tergantung, dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union or consensual marriages*. Dan pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka sering kali mendapat perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.

Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (*growth*) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan.

Secara sosiologis, dimensi struktural kemiskinan dapat ditelusuri melalui “*institutional arrangements*” yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita. Asumsi dasarnya adalah bahwa kemiskinan tidak semata-mata berakar pada “kelemahan diri”, sebagaimana dipahami dalam perspektif kultural seperti diungkap di atas. Kemiskinan semacam itu justru merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan strategi pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan serta dari pengambilan posisi pemerintah dalam perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi.

2.1.2 Distribusi Pendapatan

2.1.2.1 Pengertian distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999).

Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu; distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000).

Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*Capital Intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidak

elastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.

8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.1.2.2 Pembangunan dengan pemerataan

Perubahan ekonomi di samping mengejar laju pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek pemerataan. Ada dua argumen yang berhubungan dengan masalah pembangunan ekonomi dengan pemerataan (Todaro, 2000).

- a. Argumen tradisional

Argumen tradisional menfokuskan lebih di dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat. Akibat dari pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas, penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada umumnya dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, baik secara implisit maupun eksplisit menunjukkan bahwa mereka tidak begitu memperhatikan pentingnya masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Mereka tidak saja menganggap ketidakadilan pendapatan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam menggapai proses pertumbuhan ekonomi secara maksimum dan bila dalam jangka panjang hal itu dianggap syarat yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup

penduduk melalui mekanisme persaingan penetesan kebawah (trickle down effect) secara alamiah.

b. Argumen tandingan

Karena terdapat banyak ekonom pembangunan yang merasa bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang tidak bisa di nomorduakan, karena hal itu merupakan suatu kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Dalam argumen tandingan tersebut terdapat lima alasan yaitu;

Pertama, ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perolehan kredit. Berbagai faktor ini secara bersama-sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan GNP per kapita dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.

Kedua, berdasarkan observasi sekilas yang ditunjang oleh data – data empiris yang ada kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, orang-orang kaya di negara-negara dunia ketiga tidak dapat diharapkan kemampuan atau kesediaannya untuk menabung dan menanamkan modalnya dalam perekonomian domestik.

Ketiga, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan gizi

dan pendidikannya yang rendah justru akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat, upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merangsang meningkatkannya permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri seperti bahan makanan dan pakaian.

Kelima, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya-upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan materiil dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan serta penanggulangan ketimpangan pendapatan bukanlah tujuan-tujuan yang saling bertentangan sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain.

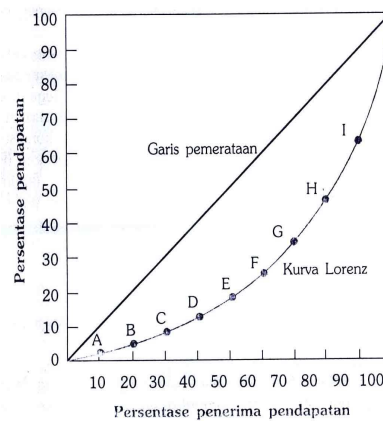
Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan kategorisasi dalam kurva Lorenz atau menggunakan koefisien Gini.

2.1.3 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.

Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Lincoln Arsyad, 1997)

Gambar 2.2
Kurva Lorenz



2.1.4 Indeks atau Rasio Gini

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio dikemukakan oleh *C.GINI* yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan :

G = Gini Ratio

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

Namun dalam studi studi empiris terutama dalam *single country*, ternyata kemiskinan **tidak identik** dengan kesejahteraan. Artinya ukuran ukuran diatas **belum** mencerminkan tingkat kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Ranis (1977) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di Republik Cina dan Ravallion dan Datt (1996) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di India, menunjukkan kedua negara tersebut dilihat dari tingkat pendapatan per kapita maupun ukuran Gini (*Gini ratio*) menunjukkan tingkat kemiskinan yang cukup parah. Namun dilihat dari tingkat kesejahteraan, kedua negara tersebut masih lebih baik dari beberpa negera Amerika Latin yang mempunyai tingkat *Gini ratio* rendah dan tingkat pendapatan perkapita tinggi. Ranis, Ravallion dan Datt memasukan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan informasi, layanan

kesehatan yang mudah dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain lain.

Intinya adalah dalam mengukur kemiskinan, banyak variabel non keuangan yang harus diperhatikan. Variabel keuangan (tingkat pendapatan) bukanlah satu satunya variabel yang harus dipakai dalam menghitung kemiskinan.

Namun kalau pengambil keputusan, lebih menitikberatkan pada *cross variable study* dalam mengatasi masalah kemiskinan, maka berarti kemiskinan akan diatasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang luas.

2.1.5 Index Williamson

Index Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson dalam tulisannya tahun 1965 merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk di suatu negara.

Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita di Kabupaten/kota i

Y = PDRB perkapita di Provinsi Jawa Tengah

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

Besarnya Index Williamson ini bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai index ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai index ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut.

Oshima menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang atau rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut (BPS, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah, 2000).

- Ketimpangan Tinggi jika $IW > 0,5$
- Ketimpangan Sedang jika $IW = 0,35 - 0,5$
- Ketimpangan Rendah jika $IW < 0,35$.

Namun demikian Index Williamson ini mempunyai kelemahan yakni penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global sejauh mana dan berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas.

2.1.6 Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di Negara Sedang Berkembang. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk,

pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Lincolin Arsyad (1997), cara yang sangat sederhana untuk mendekati masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi.

Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi empiris mengenai kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan telah banyak dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut.

1. Daniel Suryadarma, dkk (2005), dalam penelitiannya berjudul *A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia*, bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan ketimpangan pada saat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan saat terjadi krisis,

serta menguji apakah ketimpangan berhubungan dengan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran tentang ketimpangan di Indonesia selama periode tahun 1984 hingga 2002 dengan menggunakan beberapa pengukuran ketimpangan yaitu Gini Rasio, *Generalized Entropy (GE) Index*, dan *Atkinson Index*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ketika terjadi krisis semua metode pengukuran menunjukkan penurunan ketimpangan, namun sebenarnya terjadi peningkatan tetapi dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan adanya penjelasan penting yaitu bahwa tingkat kemiskinan menurun dengan cepat antara tahun 1999 dan 2002, yang disebabkan karena ketimpangan selama krisis pada tahun 1999 berada pada tingkat paling rendah.

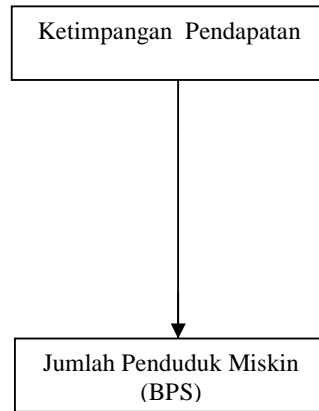
2. Bosman Pangaribuan (2005), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Blora menggunakan Analisis Shift Share, LQ, dan Index Williamson untuk mengukur PDRB, PDRB/kapita, jumlah penduduk, sektor basis, sektor non basis. Menurut Bosman berdasarkan analisis Indeks Williamson, Kabupaten Blora dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan. Indeks Williamson menunjukkan rata-rata 0,314 selama tahun pengamatan. Angka ini masih di bawah ambang kritis 0,5.
3. R. Gunawan Setianegara (2008), dalam penelitiannya berjudul Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi dan Kemiskinan, bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dalam

penelitian ini juga menggambarkan bagaimana keadaan ketimpangan pendapatan Indonesia dimulai dari tahun 1960-an hingga akhir tahun 1999 menggunakan alat pengukur ketimpangan yaitu Gini Rasio. Menurut Gunawan, ada banyak analisis yang membuktikan bahwa walaupun tingkat pertumbuhan tinggi akan selalu menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan tinggi. Selain itu jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan selalu berubah seiring tinggi rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka serta penelitian-penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita jika tidak diimbangi pemerataan distribusi pendapatan, maka tingkat kemiskinan akan terus meningkat. Akan tetapi jika pemerataan pendapatan sudah sangat baik sedangkan tingkat pendapatan nasional tidak mengalami peningkatan yang berarti maka kemiskinan juga akan meluas. Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis



Adanya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan yang dihitung menggunakan Indeks Gini dan Indeks Williamson berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Semakin kecil (mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang. Kemiskinan menurut BPS dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

2.4 Hipotesis

Untuk memberikan arah dalam penelitian ini maka diajukan hipotesis. Hipotesis yang dimaksud adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan. Sifat sementara pada hipotesis ini berarti bahwa hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang

diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini hipotesis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan yang diukur dari Indeks Gini dan Indeks Williamson berpengaruh positif pada jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan dua variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Indeks Gini dan Indeks Williamson. Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Berikut adalah definisi operasional dari variabel yang akan diteliti, yaitu :

1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah

Penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan di Provinsi Jawa Tengah. Satuan dari variabel jumlah penduduk miskin adalah dalam ribu jiwa. (BPS)

2. Indeks Gini

merupakan koefisien yang didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pendapatan kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang

berarti pemerataan sempurna, jika $B=0$ koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Satuannya rasio. Satuan dari variabel GINI adalah rasio.

3. Indeks Williamson

adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarkecamatan di suatu kabupaten/kota atau antarkabupaten/kota di suatu provinsi dalam waktu tertentu. Satuan dari variabel Williamson adalah rasio.

2 Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini data-data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber pada instansi pemerintah yang telah dipublikasikan dan data yang diolah kembali dari data sekunder yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) lembaga pemerintah yang diakui dan mempunyai legalitas dalam menerbitkan data statistik di Indonesia, berbagai website serta berbagai instansi dan literatur-literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu data jumlah penduduk miskin provinsi Jawa Tengah, Jumlah penduduk Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, Jumlah penduduk Jawa Tengah, PDRB perkapita Jawa Tengah, PDRB perkapita kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, angka Gini rasio di Jawa Tengah, serta data geografis dan data-data lain yang mendukung.

Penelitian ini menggunakan data *Time Series*. Data yang akan digunakan meliputi data kondisi perekonomian dalam kurun waktu delapan tahun (2000 – 2007), dengan wilayah penelitian yang mencakup Provinsi Jawa Tengah.

3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi.

4 Metode Analisis Data

Untuk kepentingan analisis dan interpretasi data serta menjawab hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, dipergunakan teknik analisis sebagai berikut :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis yang bersifat subyektif dengan mendasarkan pada pandangan serta pemikiran secara teoritis dengan memberikan gambaran mengenai kesesuaian fakta penelitian dengan teori.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis yang diwujudkan dalam bentuk perhitungan angka – angka berdasarkan atas data yang terkumpul.

Dalam metode analisis ini, untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah. Maka digunakan alat analisis sebagai berikut :

3.4.1 Indikator Ketimpangan

1 Analisis Indeks Williamson

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan regional di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini tendensi pemerataan

pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dengan menggunakan Indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan Indeks Williamson. Nilai angka indeks yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

3.4.2 Analisis Regresi Berganda

Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*Multiple Linier Regression Method*). Dengan spesifikasinya adalah jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan yang menggunakan Indeks Gini dan Indeks Williamson, sehingga diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Jumlah penduduk miskin

X₁ = Indeks Gini

X₂ = Indeks Williamson

e = Error

β₀ = Konstanta

β₁- β₂ = Koefisien masing-masing variabel independen

Persamaan diatas merupakan model yang akan digunakan dalam penelitian yang akan menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen untuk mendapatkan taksiran parameter maka digunakan teknik OLS (*Ordinary Least Square*) yang mengikuti asumsi kenormalan BLUE (*Best Linear Unbiased ludahan Estimator*) yaitu penaksiran terbaik linear yang tidak bias. Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model yang

digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik, guna mengetahui apakah model tersebut dapat dianggap relevan atau tidak.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan pemakaian metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih sahih, maka model asumsi klasik harus diuji. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari :

1 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan suatu kuadran dimana satu atau lebih variabel dependennya dapat menyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Dan bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel Ortoground adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Multikol dapat dilihat juga dari tolerance and variance inflation faktor (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolineritas dalam suatu model empiris. Misalkan nilai R^2 dari hasil estimasi regresi secara parsial mendekati 1, maka nilai VIF akan mempunyai nilai tak terhingga. Dengan demikian, bila kolineritas meningkat, maka varian dari penaksir akan meningkat dalam limit yang tak terhingga. VIF dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{VIF} = \frac{1}{(1 - r^2_{x1x2})}$$

Sebagaimana rule of thumb dari VIF, jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana

hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0.09, maka suatu variabel dikatakan berkolerasi sangat tinggi. (Gujarati, 1999).

Dan nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 dan hasil perhitungan VIF tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. (Ghozali, 2005).

2 Uji Heteroskedastisitas

Satu asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah gangguan (disturbance) μ_i yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama (Gujarati, 1999). Dengan menggunakan lambang :

$$E(\mu_i)^2 = \sigma^2 \quad i = 1, 2, \dots, N$$

Sedangkan bila terdapat heteroskedastisitas maka lambangnya:

$$E(\mu_i^2) = \sigma^2$$

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan metode informal dan metode formal. Metode informal yaitu dengan menggunakan sifat dasar masalah dan dengan metode grafik. Metode formal yaitu dengan pengujian Park, Glejser, pengujian Rank Korelasi Sperman, uji Goldfeld-Quandt, uji Breusch-Pagan-Godfrey, uji White General Heteroscedasity dan uji Koenker Bassett (Gujarati, 1999). Ada dua pendekatan untuk perbaikan jika terdapat heteroskedastisitas, pendekatan pertama jika σ_i^2 diketahui maka digunakan metode kuadrat kecil tertimbang (*Weighted Least Squares*) dan jika σ_i^2 tidak diketahui maka digunakan *White's Heteroskedasity-Consistence Variance* dan *Standard Errors*.

3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antar variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series. Dampak yang timbul akibat adanya autokorelasi, taksiran yang diperoleh dengan menggunakan OLS tidak lagi BLUE, namun masih tak bias, dan konsisten. Oleh karenanya interval kepercayaan menjadi lebar, dan uji signifikan kurang kuat. Akibatnya uji t dan uji F tidak dapat dilakukan, atau hasilnya tidak akan baik. Mendeteksi autokorelasi melalui uji Durbin–Watson, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 $0 < d < dL$: ada autokorelasi
- 2 $dL \leq d \leq dU$: tanpa kesimpulan
- 3 $dU \leq d \leq 4 - dU$: tidak ada autokorelasi
- 4 $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$: tanpa kesimpulan
- 5 $\geq 4 - dL$: ada autokorelasi

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

1. Autokorelasi bila dalam DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (d_u) dan ($4 - d_u$), maka koefisien sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila DW lebih rendah dari pada batas bawah atau *lower bound* (d_l), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi.
3. Bila dalam DW lebih besar dari pada ($4 - d_l$), maka autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila dalam DW terletak diantara batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) atau DW terletak antara ($4 - d_l$) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. (Ghozali, 2005)

3.4.4 Pengujian Hipotesis

1 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji Fisher (Uji F) merupakan alat uji statistik secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003). Dari uji F dapat diketahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, di mana nilai F hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut (Gujarati, 1999) :

$$F_1 = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (N - k)}$$

Di mana :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel penjelas termasuk konstanta

H_0 diterima apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

2 Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependennya. Nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{(\beta_i - \beta)}{S_b}$$

Di mana :

β_i = Koefisien variabel independen ke-i

β = Nilai hipotesis nol

S_b = Simpangan Baku (Standar Deviasi) dari variabel independen ke-i

Untuk mengetahui t_{tabel} :

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha ; df), df = N - K - 1$$

Dimana :

α = 0,05

N = jumlah observasi

F = jumlah variabel independen

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya jika t hitung \leq t tabel, maka variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependennya.